

IMPLEMENTASI E-KEUANGAN : PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN DI PEMERINTAHAN KABUPATEN TEMANGGUNG

SHafa EDITYA KARTIKA SARI
ENDANG KARTINI PANGGIARTI,
SUCI NASEHATI SUNANINGSIH

Fakultas Ekonomi Program Studi Akuntansi Universitas Tidar

edityashafa@gmail.com, endangkartini@untidar.ac.id, sucinasehati@untidar.ac.id

ABSTRACT

This research aims to convey an illustration of how the implementation of the process of preparing financial statements in Temanggung Regency compiled by BPKPAD and knowing what are the problems it is facing. The problems faced are related to the level of regional device work units (SKPD) that are late in the submission of SKPD financial statements to BPKPAD. with the problems that arise, it will affect the work process on BPKPAD such as delays during the realization of consolidated reports. The method used in this study is a case study using a type of qualitative method. This research object unit is at the Financial Management, Investment and Regional Assets Agency (BPKPAD) of Temanggung Regency. The results showed that BPKPAD Temanggung Regency uses the E-Financial software system in the preparation of consolidated financial statements.

Keywords: *E-Finance, Implementation, , Preparation of financial*

PENDAHULUAN

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang keuangan Negara, Undang- Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Nagara dan Undang- Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara merupakan satu paket pedoman hukum yang dapat menjadi bekal pengaturan di lingkungan pengendalian Keuangan Negara. Cara yang baik untuk mendapatkan otoritas yang idealis, ditegaskan dalam pasal 32 ayat 1 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara bahwa “bentuk dan isi dokumen pertanggung jawaban pelaksanaan APBN/APBD diatur dan dilengkapi dengan peraturan perundang-undang”.

Pelaksanaan otonomi daerah yang diikuti dengan desentralisasi ekonomi sesuai Undang-Undang nomor 23 Tahun 2014 perihal Pemerintahan daerah dan Undang-Undang nomor 33 tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah menunjukkan kesungguhan pemerintah pada pembaruan sistem pemerintah dari sentralisasi menuju desentralisasi dengan menyampaikan kewenangan yang lebih besar di pada daerah, termasuk kewenangan pada pengelolaan keuangan daerah. Laporan Keuangan Pemerintah Daerah merupakan bentuk tanggungjawab otoritas terdekat dalam pengendalian ekonomi sekitar, mulai dari Perencanaan, Penganggaran, Pelaksanaan, Penatausahaan, Pertanggung jawaban, serta Pelaporan. Pertanggungjawaban atas pengelolaan keuangan Daerah seharusnya diwujudkan dalam bentuk Laporan Keuangan. Untuk ini selaku entitas akuntansi, Perangkat Daerah harus melaksanakan penyusunan laporan keuangan yang meliputi Neraca, LRA, Laporan Arus Kas, dan CaLK.

Di Pemerintah Kabupaten Temanggung setiap Perangkat Daerah perlu membuat laporan keuangan untuk memenuhi tanggungjawab Perangkat Daerah kepada Bupati yang nantinya akan digunakan Pemerintah Daerah untuk mengevaluasi kinerja Perangkat Daerah secara keseluruhan. Maka dari itu setiap Perangkat Daerah harus mampu menggunakan sistem penyusunan laporan keuangan yang dipakai pada Pemerintah Kabupaten Temanggung. Sistem tersebut adalah aplikasi E-Kuangan Akuntansi, dimana aplikasi ini

baru digunakan pada akhir tahun 2021.

Kendala yang dihadapi saat ini yaitu kurang pengetahuannya Perangkat Daerah dalam menyusun dan membuat laporan keuangan menggunakan aplikasi e- keuangan. Maka dari itu, peneliti ingin mengetahui “Bagaimana Proses Penyusunan Laporan Keuangan di Pemerintahan Kabupaten Temanggung.”

LANDASAN TEORI

Implementasi

Implementasi berdasarkan Usman (2002) yaitu yang menghasilkan kegiatan, tindakan, atau adanya prosedur suatu sistem. Menurut Pressman dan Wildavsky (1978) mengutarakan bahwa, “*implementation as to carry out, accomplish, fulfill, produce, complete*”. Artinya yaitu melaksanakan, menyempurnakan, mengisi, menghasilkan, dan melangkapi.

Kemudian menurut Prof. Matland (2009) menunjukkan bahwa Implementasi: “Implementasi secara administrative artinya pelaksanaan yang dilakukan dalam waktu sehari-hari operasi birokrasi pemerintahan, implementasi secara politik yaitu implementasi yg ingin dilaksanakan secara politik dan implementasi secara simbolik tentang peraturan yang memiliki ambiguitas tinggi serta perseteruan yg tinggi”.

Dari definisi diatas bisa disimpulkan bahwa Implementasi tidak selalu sekedar kegiatan, tetapi juga aktivitas yang berkalaserta dilaksanakan dengan sungguh-sungguh yang mengacu berdasarkan norma-norma tertentu untuk memperoleh pelaksanaan aktivitas tersebut.

E-Kuangan

Sistem penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Temanggung yang mampu menyajikan laporan keuangan di tingkat Perangkat Daerah sampai dengan laporan keuangan konsolidasi secara akuntabel. Sebuah sistem ini memanfaatkan data pencairan SP2D dari Bidang Perbendaharaan BPKPAD Kabupaten Temanggung serta dari google spreadsheets penatausahaan bendahara penerimaan dan bendahara pengeluaran.

Penyusunan

Menurut KBI (Kamus Bahasa Indonesia) mengemukakan bahwa “Penyusunan berasal dari frasa sederhana susun yang berarti formasi, sedangkan pengertian dari penyusunan yaitu aktivitas memproses suatu data yg dilakukan oleh suatu organisasi atau perorangan secara baik dan teratur”.

Laporan Keuangan

Laporan Keuangan sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Pengertian Keuangan Daerah adalah laporan yang dilakukan oleh suatu entitas pelaporan. Entitas pelaporan yaitu unit otoritas pusat yang terdiri dari 1 atau lebih entitas akuntansi yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan diwajibkan memberikan laporan pertanggungjawaban, dalam bentuk laporan keuangan yang bermaksud luas. Dari pengertian diatas dapat dipastikan bahwa Laporan Keuangan Pemda merupakan bukti konkret pertanggungjawaban atas penggunaan keuangan daerah dalam jangka waktu 1 thn periode anggaran sebagai bentuk pelaksanaan otonomi daerah serta pelaksanaan kewenangan penyelenggaraan.

Pemerintahan

Menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, Pemerintah Daerah adalah penyelenggaraan dari pengelolaan kewenangan terdekat, karena

penyelenggaraan urusan berada di bawah kewenangan daerah yang mandiri. Dengan demikian, Otoritas Daerah adalah salah satu alat dalam sistem penyelenggaraan Pemerintahan.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan studi kasus melalui deskriptif kualitatif. Dalam metode ini, memusatkan studi kasus yang membahas permasalahan pemerintahan daerah dalam mengimplementasikan E- Keuangan Akuntansi. Teknik pengumpulan data menggunakan cara sebagai berikut:

1. Wawancara
Menurut Sugiyono (2014) wawancara merupakan teknik mendapatkan data untuk melakukan penelitian melalui pertanyaan tatap muka dan solusi antara penanya dan narasumber. Dalam penelitian ini, peneliti melaksanakan wawancara dengan beberapa Kabid Akuntansi & Pelaporan Keuangan, Kassubid Akuntansi & Pelaporan Keuangan, dan staf Akuntansi & Pelaporan Keuangan.
2. Pengamatan (Observasi)
Observasi merupakan rangkaian pencatatan melalui pengamatan langsung di lokasi penelitian. Observasi ini dilakukan langsung di BPKPAD Kabupaten Temanggung.
3. Dokumentasi
Berdasarkan Sugiyono (2014) Dokumentasi yaitu teknik pengumpulan serta pencarian arsip tentang catatan, buku, laporan, dokumentasi. Dalam dokumentasi, peneliti melakukan dokumentasi berupa cara menggunakan E- Keuangan, foto, profil instansi dll.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Laporan Realisasi Anggaran (LRA) Bulanan menjadi salah satu bagian kewajiban Pemerintah Daerah di seluruh Indonesia yang wajib dilaporkan ke DJPK Kementerian Keuangan sesuai PMK Nomor 231/07 Tahun 2020 Tata Cara Penyampaian Informasi Keuangan Daerah, Menimbang Laporan Data Bulanan, dan Laporan Pemerintah Daerah Lainnya.

Pada tahun 2021 merupakan tahun masa transisi dalam pengelolaan keuangan daerah, bersamaan dengan penerapan Pemendagri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, & Nomenklatur Perencanaan Pembangunan & Keuangan Daerah, dan Pemendagri Nomor 70 Tahun 2020 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD). Seluruh Pemerintahan Daerah di Indonesia harus menggunakan aplikasi SIPD dari Kementerian dalam Negeri, tetapi penyediaan sistem/ aplikasi tersebut belum sepenuhnya optimal khususnya di penatausahaan dan pelaporan keuangan. Dan di satu sisi lain sistem/ aplikasi yang dipakai tahun anggaran sebelumnya sudah tidak bisa digunakan lagi karena dibutuhkan penyesuaian struktur dan kodefikasi.

Karena implementasi SIPD Penatausahaan di Kabupaten Temanggung belum berjalan dengan optimal, maka Pemerintahan Daerah Kabupaten Temanggung membuat alternatif dalam penatausahaan kas Bendahara Pengeluaran maupun Bendahara Penerimaan dan penyusunan LRA menggunakan *Google Spreadsheets* terintegrasi. Data anggaran yang dipakai dalam menyusun penatausahaan kas bendahara dan LRA ini menggunakan dataset dari SIPD Penganggaran dari format Rekap 18 excel yang diolah agar dapat digunakan sebagai dasar anggaran di penatausahaan maupun di LRA. Pelaporan keuangan dari Bendahara Pengeluaran, Bendahara Penerimaan dan Pejabat Penatausahaan Keuangan (PPK) seluruh Perangkat daerah dengan menggunakan *google spreadsheets* selanjutnya menjadi bahan verifikasi dan rekonsiliasi di Perangkat Daerah dan menjadi dasar penyusunan laporan keuangan khususnya LRA Konsolidasi bulanan yang dilakukan oleh BPKPAD Kabupaten temanggung.

Pemanfaatan *google spreadsheets* sebagai media pelaporan keuangan diantaranya pembuatan BKU, Buku Pembantu Kas Bank, Buku Pembantu Kas Tunai, Buku Pembantu Kas Pajak di masing-masing Perangkat Daerah, Pembuatan LRA Konsolidasi di kabupaten Temanggung, dan menjadi sebuah data laporan keuangan yang terkontrol dan terstruktur, maka dapat dijadikan sebuah support data laporan keuangan. Dan dengan adanya *google spreadsheets* ini BPKPAD Kabupaten Temanggung dapat membuat LRA Konsolidasi bulanan, sehingga dapat memenuhi kewajiban pelaporan LRA bulanan kepada DJPK Kementerian Keuangan maupun pihak lain yang membutuhkan sehingga terhindar dari sanksi yang ditetapkan.

Dalam penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah daerah Kabupaten Temanggung membutuhkan sebuah sistem yang mampu menyajikan Laporan Keuangan di tingkat Perangkat Daerah sampai dengan Laporan Keuangan Keuangan Konsolidasi secara akuntabel. BPKPAD Kabupaten Temanggung mengembangkan sebuah aplikasi akuntansi yang memanfaatkan data pecairan SP2D dari Bidang Perbendaharaan BPKPAD Kabupaten Temanggung dan dari *google spreadsheets* penatausahaan Bendahara Penerimaan, dan Bendahara Pengeluaran. Proses migrasi data keuangan ke dalam aplikasi E-Kuangan Akuntansi ini dibagimenjadi empat kelompok data, sebagai berikut:

1. Data Saldo Awal

Data Saldo Awal merupakan hasil data Neraca Saldo *Audited* tahun sebelumnya yang di upload ke dalam database E-Kuangan Akuntansi. Untuk Saldo Awal tahun 2021 Pemerintah Kabupaten Temanggung melakukan pergantian akun kodifikasi melalui mapping koderekening yang dipakai tahun sebelumnya yang disesuaikan ke dalam akun kodifikasi.

2. Data Bendahara Penerimaan

Data Bendahara Penerimaan merupakan seluruh transaksi penerimaan dan penyetoran pendapatan dari seluruh Perangkat Daerah di Kabupaten Temanggung yang sudah diinput ke dalam *google spreadsheets*, data ini di olah struktur datanya sehingga dapat di migrasi dan di upload ke dalam database E- Kuangan Akuntansi. Dari data ini akan secara otomatis membentuk jurnal pendapatan LRA dan LO serta membentuk jurnal penyetoran pendapatan.

3. Data Bendahara Pengeluaran

Data Bendahara Pengeluaran merupakan seluruh transaksi yang dicatat oleh Bendahara Pengeluaran dari seluruh Perangkat Daerah di Kabupaten Temanggung yang diinputkan ke dalam *googlespreadsheets*, data ini diolah struktur datanya sehingga dapat di migrasi dan diupload ke database E-Kuangan Akuntansi. Dari data ini akan secara otomatis membentuk jurnal belanja LRA dan LO serta membentuk jurnal penerimaan dan penyetoran pajak pusat maupun pajak daerah. Khusus dari data Bendahara Pengeluaran ini yang dimanfaatkan di dalam aplikasi E-Kuangan Akuntansi yaitu data transaksi belanja bersumber dari UP, GU, TU serta transaksi yang berasal dari transaksi belanja BLUD dan BOS.

4. Data Pencairan SP2D

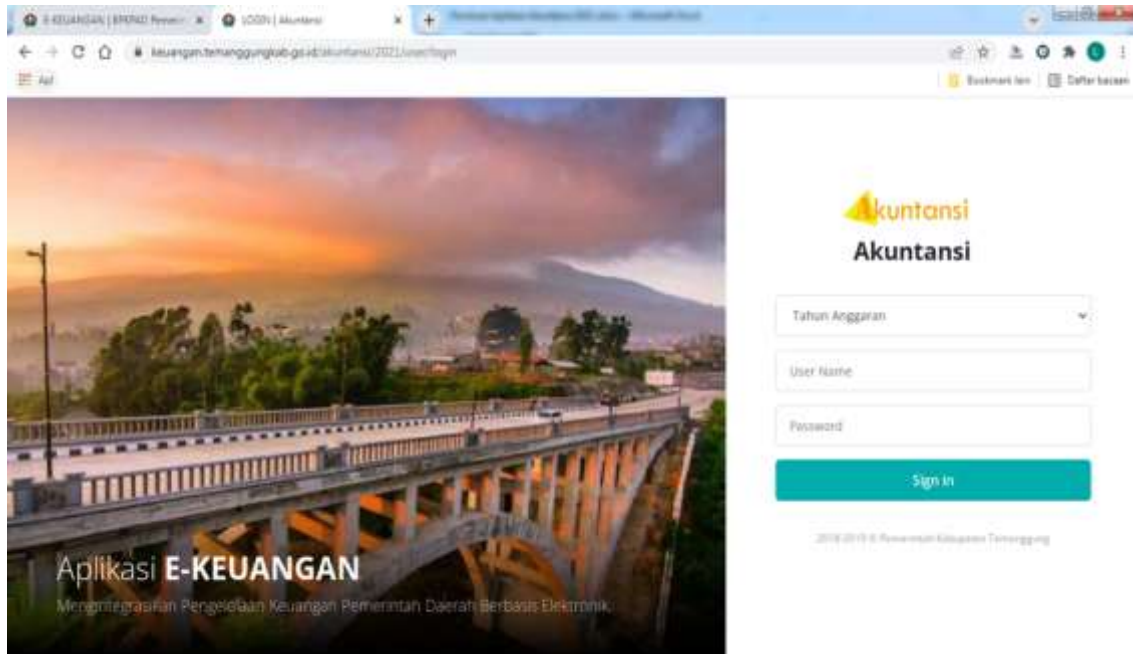
Data Pencairan SP2D berasal dari Bidang Perbendaharaan BPKPAD Kabupaten Temanggung, data ini juga secara bersamaan diupload ke dalam aplikasi Penatausahaan Perbendaharaan dan Akuntansi. Proses migrasi data ini secara otomatis akan membentuk data jurnal di dalam database E-keuangan Akuntansi yaitu berupa data jurnal penerimaan SP2D LS Gaji, LS Non Gaji, UP, GU, dan Tu serta data jurnal belanja LRA dan LO yang bersumber dari SP2D LS Gaji dan Non Gaji.

Dari hasil migrasi data keuangan tersebut yang sudah masuk ke dalam database E-Kuangan Akuntansi maka terdapat seluruh data transaksi jurnal yang dapat dipakai sebagai bahan dasar dalam penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten

Temanggung.

Cara mengakses aplikasi E- Keuangan Akuntansi, sebagaiberikut:

1. Buka Browser dan ketik URL: <https://keuangan.temanggungkab.go.id/>
2. Masuk ke Aplikasi, di menu ini akan muncul beberapa portal menu aplikasi E-keuangan. Pilih dan klik menu Akuntansi selanjutnya pilih dan klik Tahun Anggaran 2021 maka isikan data username dan password sesuai user masing-masing.



Menu yang terdapat dalam aplikasi E-Keuangan Akuntansi SKPD, yaitu:

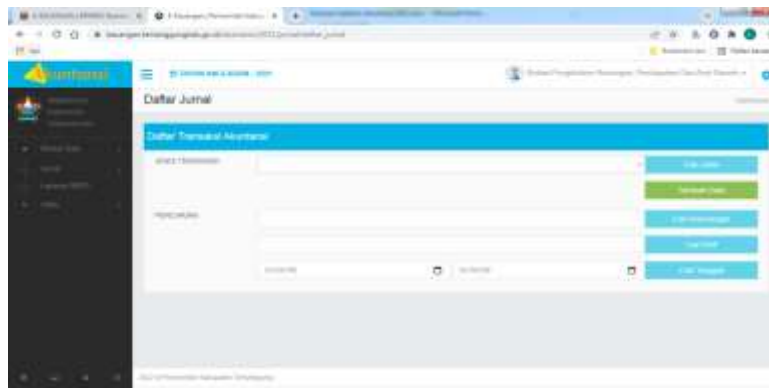
1. Master Data » Rekening

Menu ini digunakan untuk menampilkan seluruh kodefikasi rekening yang digunakan dalam aplikasi E-Keuangan Akuntansi ditampilkan dalam bentuk sesuai akun, kelompok, jenis, objek, rincian objek dan sub rincian objek dengan tampilan sebagai berikut:



2. Jurnal » Daftar Jurnal

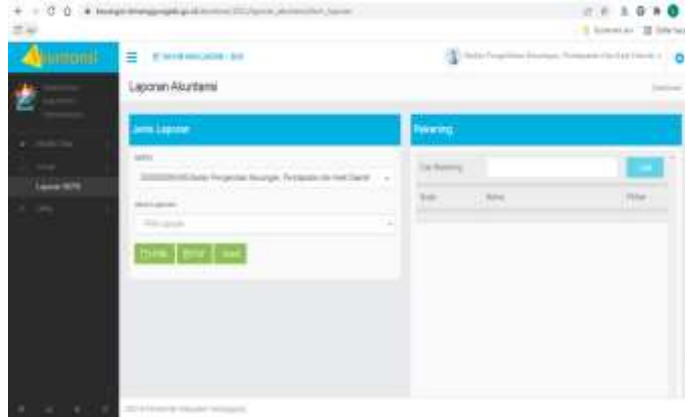
Menu ini digunakan sebagai akses untuk menampilkan daftar transaksi jurnal dan melakukan penambahan jurnal non anggaran dan jurnal penyesuaian/ umum yang dibutuhkan dalam proses penyusunan laporan keuangan. Dengan tampilan sebagai berikut:



Dalam menu ini terdapat beberapa tombol antara lain pilihan jenis transaksi, tombol pencarian berdasarkan jenis jurnal, tombol tambah data, tombol pencarian berdasarkan keterangan, berdasarkan reff dan berdasarkan tanggal.

3. Laporan SKPD

Menu ini digunakan untuk laporan atau hasil jurnal yang dibutuhkan dalam proses penyusunan laporan keuangan SKPD. Tampilannya sebagai berikut:



Dalam menu laporan SKPD ini terdapat beberapa jenis laporan akuntansi, berikut ini merupakan laporan-laporan SKPD, antara lain:

- Laporan Jurnal > Pilih Jenis Laporan Jurnal ⇒ Pilih Jenis Jurnal ⇒ Pilih Tanggal Dari ⇒ Pilih Tanggal Sampai ⇒ Klik HTML
- Laporan Buku Besar > Pilih Jenis Laporan Buku Besar ⇒ Pilih Kode Rekening ⇒ Pilih Tanggal Dari ⇒ Pilih Tanggal Sampai ⇒ Klik HTML
- Laporan Buku Besar Berdasarkan kegiatan dan Rekening > Pilih Jenis Laporan Buku Besar Berdasarkan Kegiatan dan Rekening ⇒ Pilih Sub Kegiatan ⇒ Pilih Kode Rekening ⇒ Pilih Tanggal Dari ⇒ Pilih Tanggal Sampai ⇒ Klik HTML
- Laporan Neraca Saldo > Pilih Jenis Neraca Saldo ⇒ Pilih Tanggal Sampai ⇒ Klik HTML
- Laporan Perubahan Ekuitas > Pilih Jenis Laporan Perubahan Ekuitas ⇒ Pilih Tanggal Sampai ⇒ Klik HTML
- Laporan Operasional > Pilih Jenis Laporan Operasional ⇒ Pilih Tanggal Sampai ⇒ Klik HTML
- Laporan Neraca > Pilih Jenis Laporan Neraca ⇒ Pilih Tanggal Sampai ⇒ Klik HTML
- Laporan Realisasi Anggaran > Pilih Jenis Laporan Realisasi Anggaran ⇒ Pilih Tanggal Dari ⇒ Pilih Tanggal Sampai ⇒ Klik HTML
- Laporan Rekapitulasi SPJ Belanja > Pilih Jenis Laporan Rekapitulasi SPJ Belanja ⇒ Pilih Tanggal Dari ⇒ Pilih Tanggal Sampai ⇒ Klik HTML
- Laporan Rekapitulasi SPJ Pendapatan > Pilih Jenis Laporan Rekapitulasi SPJ Pendapatan ⇒ Pilih Tanggal Dari ⇒ Pilih Tanggal Sampai ⇒ Klik HTML
- Laporan Realisasi berdasarkan Program/Kegiatan > Pilih Jenis Laporan Realisasi

- Berdasarkan Program/Kegiatan ⇒ Pilih Tanggal Dari ⇒ Pilih Tanggal Sampai ⇒ Klik HTML
- l. Laporan Realisasi berdasarkan Program/Kegiatan dan Rekening > Pilih Jenis Laporan Realisasi Berdasarkan Program/ Kegiatan dan Rekening ⇒ Pilih Sub Kegiatan ⇒ Pilih Tanggal Dari ⇒ Pilih Tanggal Sampai ⇒ Klik HTML
 - m. Laporan Penjabaran > Pilih Jenis Laporan Penjabaran ⇒ Pilih Tanggal Dari ⇒ Pilih Tanggal Sampai ⇒ Klik HTML
 - n. Utility > Pilih Jenis Laporan Lampiran I ⇒ Pilih Tanggal Dari ⇒ Pilih Tanggal Sampai ⇒ Klik HTML

KESIMPULAN

Berdasarkan penelitian yang dilaksanakan pada BPKPAD Kabupaten Temanggung, peneliti menarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Kualitas Laporan Keuangan pemda yang dirancang melalui BPKPAD Kabupaten Temanggung memiliki keunggulan akurat.
2. Kompetensi SDM di BPKPAD dinyatakan berperan krusial pada laporan keuangan pemda Kabupaten Temanggung.

SARAN

Berikut saran yang diberikan terutama berdasarkan hasil penelitian sebagai berikut, memberikan sosialisais kepada Perangkat Daerah yang mengelola penyusunan laporan keuangan untuk meningkatkan kopetensi Sumber daya Manusia tentang aplikasi E-Kuangan. Dan mengoptimalkan penggunaan Sistem Informasi Akuntansi (E-Kuangan Akuntansi).

DAFTAR PUSTAKA

- Darmayanti, Herawati. 2017. Implementasi Penyusunan Laporan Keuangan Berdasarkan SAK-ETAP dan Penilaian Kinerja Pada UMKM Pengrajin Endek Mastuli "Ayu Lestari" di Desa Kalianget Bebeleng. *e-Journal SI AK Universitas Pendidikan Ganesha*, no. 7 (Januari).
- DJP KKementerian Keuangan. PMK No 231/07 Tahun 2020 Tentang Tata Cara Penyampaian Informasi Keuangan Daerah, Menimbang Laporan Data Bulanan, dan Laporan Pemerintah Daerah Lainnya.
- Halim, Abdul. 2007. *Akuntansi Sektor Publik Akuntansi Keuangan Daerah*. Jakarta: Salemba Empat. *BPKPAD Kabupaten Temanggung*. (2022, 228).
- Halim, Abdul. 2012. *Akuntansi Sektor Publik: teori, konsep dan aplikasi*. Jakarta: Salemba Empat. <https://bpkpad.temanggungkab.go.id>
- Juwita, R. 2013. Pengaruh Implementasi Standar Akuntansi Pemerintah dan Sistem Informasi Akuntansi Terhadap Kualitas Laporan Keuangan. *Trikonomika*, 201-214.
- Mahmudi. 2007. *Analisis Laporan Keuangan Daerah*. Yogyakarta: UUP STIM YKPN.
- Mardiasmo. 2009. *Akuntansi Sektor Publik*. Yogyakarta: Andi.
- Nuvitasi, A. 2019. Implementasi SAK EMKM Sebagai Dasar Penyusunan Laporan Keuangan Usaha Mikro Kecil dan Menengah. *International Journal of Social Science and Business*, no. 3(Maret): 341-347.
- Pakpahan, Elsy. 2019. Implementasi Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis AkruaL Dalam Penyusunan Laporan Keuangan Di Badan Pengelolaan Keuangan Pendapatan dan Aset Daerah Kota Sibolga Provinsi Sumatera Utara. *Jurnal Otonomi Keuangan Daerah*, no. 7(Januari): 57-71.
- Pemendagri No 90 Tahun 2019 Tentang Klasifikasi, Kodefikasi, & Nomenklatur Perencanaan Pembangunan & Keuangan Daerah.
- Pemendagri No 70 Tahun 2020 Tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD).

- Pradono, Febrian. 2015. Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah: Faktor yang Mempengaruhi dan Implementasi Kebijakan. *Jurnal Bisnis dan Ekonomi*, no. 22(Februari). 188-200.
- Ridwan. 2013. *Metode dan Teknik Menyusun Proposal Penelitian*, Alfabeta: Bandung.
- Rohmah, F. 2017. Proses Penyusunan Laporan Keuangan Konsolidasi Kabupaten Sleman (Studi Kasus pada Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Sleman). *Tugas Akhir D3 Akuntansi SV UGM*.
- Sumaryadi, I Nyoman. 2005. *Efektivitas implementasi Kebijakan Otonomi Daerah*. Jakarta: Citra Utama.
- UU No. 1 Tahun 2004 Tentang Perbendaharaan Daerah.
- UU No. 15 Tahun 2004 Tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan TanggungJawab Keuangan Negara.
- UU No. 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara/ Daerah.
- UU No. 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah.
- UU No. 33 tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan antaraPemerintah Pusat dan Daerah.
- Wiyanto, J. 2015. Evaluasi Penyusunan Laporan Keuangan Konsolidasi Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Magelang. *Tugas Akhir D3 Akuntansi SV UGM*.